

30. ERNA KRISNAWATI, S.H. (Kemantren Umbulharjo)
31. WINDY KUSUMA JAYANTI ()
32. MOHAMAD RIDWAN, S.Sos. (Dindikpora)
33. AHMAD RIFA'I, A.Md (Dindikpora)
34. AMIN NATA, S.E. (Dinpertangan)
35. EDY SUGIHARTO, S.STP., M.M. (Dinkominfo)
36. YULI PURWANDARI, S.Si. (Kemantren Gondomanan)
37. SUSILA HADI, A.Md. (Dinkominfo)
38. JULIAN FIKRI LESTARI, A.Md. (Dinkominfo)
39. YOLANDA FAJAR NURMANTO, S.I.P. (Dinkominfo)
40. TYAGITA INDAHSAARI WIDODO, S.K.Pm. (Dinkominfo)
41. AFFAN SETIAWAN PRATAMA (Dinkominfo)
42. DITY OCTYVIRA NUR'AINI, S.I.P. (Dinkominfo)
43. ANNA FARDIANA, S.S. (Dinkominfo)
44. SEPTI ERMAWATI, A.Md. (Dinkominfo)
45. ALMAFITRA ICHTIARY H (Dinkominfo)
46. FRANS INDIARTO, S.I.P., M.Ec.Dev. (Dinkominfo)
47. CHICI FAJARIYANTI, A.Md. (Dinkominfo)
48. TRI DARMIYATI (Dinkominfo)
49. ALMIRA NABILA, S.I.Kom. (Dinkominfo)
50. ANIK PUSPITO SARI (Dinkominfo)

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Pembukaan
2. Isi
3. Penutup

1. Kata Pembukaan : Rapat dibuka oleh Kepala Bidang IKP

2. Pembahasan : 1. Bahwa pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan yang rutin setiap tahun.
2. Monev menjadi tolak ukur keterbukaan informasi Badan Publik dan mengukur kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
3. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah penyusunan DIK yang harus diperbaharui dalam periode tertentu. Hal ini karena DIK tidak berlaku selamanya, dan harus dilakukan uji konsekuensi berkala
4. Dalam Monev KIP, Badan Publik akan diberikan predikat berupa Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif.
5. Ada penambahan indikator dalam Monev yang semua 3 menjadi 6 indikator. indikator tersebut berupa Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana, Digitalisasi, Jenis Informasi, Kualitas Informasi dan Pelayanan.
6. Dalam proses Monev KID agar selama bulan Agustus sampai September, petugas agar standby baik secara koneksi maupun memantau email masuk
7. Pada saat mengisi SAQ, PLID agar teliti dalam mencermati pertanyaan dan dalam unggah dokumen dukung.
8. Bukti dukung ada yang bersifat kumulatif, sehingga jika tidak terpenuhi salah satu maka akan memperoleh nilai 0. Hal ini harus menjadi perhatian PLID dalam pengisian bukti dukung.
9. terkait LHKPN bahwa untuk bukti dukung adalah pengiriman LHKPN 2023 dan LHKPN Tahun 2022

3. Keputusan : 1. Badan Publik di Kota Yogyakarta berkomitmen untuk melaksanakan Monev



KIP 2024 dengan baik berdasarkan pelayanan yang telah dilakukan
2. Tahun 2024 PPID Pemkot Yogyakarta menargetkan semua OPD di Lingkungan
Pemkota Yogyakarta informatif.



PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

EDY SUGIHARTO, S.STP., M.M.
NIP. 197904231999121001



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN